JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Implementasi Program Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Tinggi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang

Alfiah[1] Ipah Ema Jumiati[2] Dwisapto Yusuf Pradana[3]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia[1,2,3]
Email: 6661220041@untirta.ac.id[1] ipah.ema@untirta.ac.id[2] dwisapto.yusuf@untirta.ac.id[3]

Abstrak

Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meratanya manfaat program bagi masyarakat kurang mampu, keterlambatan pembaruan status desil pada DTSEN, adanya penurunan besaran bantuan dari Rp8.000.000 menjadi Rp6.000.000, belum adanya sosialisasi teknis pengumpulan SPJ kepada PSM, keterlambatan penyerahan SPJ oleh penerima, serta tingginya tekanan biaya hidup masyarakat. Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Tinggi di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dengan 6 aspek yaitu Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Disposisi, Komunikasi Antar Organisasi, serta Lingkungan, Sosial, dan Politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara 6 aspek tersebut, aspek ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan anggaran, sistem pendaftaran digital, serta dukungan politik telah berjalan cukup baik. Namun, aspek lainnya seperti kapasitas SDM pengelola data, fleksibilitas pendataan desil, dan keterlibatan PSM dalam pendampingan SPJ belum sepenuhnya optimal, sehingga saran yang diperlukan adalah dilakukannya penambahan kapasitas pengelola data, pembekalan teknis mekanisme SPJ kepada PSM, serta penguatan koordinasi agar bantuan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Bansos Mahasiswa, DTSEN, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study is motivated by several challenges in the implementation of the Higher Education Social Assistance Program, including the unequal distribution of program benefits among economically disadvantaged communities, delays in updating decile status in the National Integrated Socioeconomic Data (DTSEN), a reduction in the amount of financial assistance from IDR 8,000,000 to IDR 6,000,000, the absence of technical guidance for Community Social Workers (PSM) regarding accountability report (SPJ) submission procedures, delays in the submission of accountability reports by beneficiaries, and increasing living costs. This study aims to examine the implementation of the Higher Education Social Assistance Program in Larangan District, Tangerang City. A qualitative research method with a descriptive approach was employed, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The analysis was based on the policy implementation framework developed by Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, encompassing six dimensions: policy standards and objectives, resources, disposition, inter-organizational communication, and the economic, social, and political environment. The findings indicate that several implementation dimensions, particularly policy standards and objectives, budget availability, the digital registration system, and political support, have been functioning relatively well. However, other aspects, including the human resource capacity of data administrators, flexibility in updating decile-based socioeconomic data, and the involvement of Community Social Workers in assisting beneficiaries with accountability report preparation, remain suboptimal. Therefore, this study recommends strengthening the capacity of data administrators, providing technical training for Community Social Workers on accountability report procedures, and improving inter-organizational coordination. These measures are expected to enhance the accuracy of beneficiary targeting and improve access to higher education among disadvantaged communities.

Keywords: *Program Implementation, Student Social Assistance, DTSEN, Community Welfare*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan finansial kerap menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Sebagai langkah strategis dalam merespons tekanan ekonomi pasca pandemi dan mitigasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Penanganan Dampak Inflasi Bagi Mahasiswa. Kebijakan ini mengamanatkan pemberian alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp6.000.000,00 per mahasiswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meskipun dirancang untuk meringankan beban ekonomi, penyaluran bantuan sosial di tingkat lokal kerap berhadapan dengan kompleksitas implementasi, seperti kendala komunikasi antar-instansi pelaksana, ketepatan sasaran pendataan digital, hingga hambatan teknis penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh penerima manfaat di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Kajian mengenai evaluasi dan implementasi kebijakan bantuan sosial pendidikan telah banyak menyita perhatian para peneliti dalam satu dekade terakhir. Beberapa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada evaluasi efektivitas program bantuan secara kuantitatif, analisis dampak program terhadap keberlangsungan studi mahasiswa, maupun efektivitas penyaluran alokasi dana secara makro. Penelitian-penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan program bantuan sosial terletak pada validitas basis data sasaran, efisiensi mekanisme birokrasi, serta komitmen para pelaksana di lapangan. Selain itu, kajian kebijakan publik modern menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah daerah dan keterlibatan aktif petugas di wilayah seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mengawal transparansi verifikasi dan validasi data penerima di tingkat tapak.

Meskipun kajian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman bantuan sosial, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Sebagian besar literatur yang ada cenderung menganalisis program bantuan secara parsial, hanya menelaah aspek efektivitas anggaran semata atau kriteria penerima bantuan secara teknis tanpa membedah dinamika interaksi antar aktor pelaksana secara holistik. Belum ada studi yang secara komprehensif mengkaji implementasi kebijakan Bantuan Sosial Mahasiswa berbasis penanganan dampak inflasi daerah di tingkat perkoan dengan mengintegrasikan analisis lintas instansi (DPRD, Dinsos, BPKD, Perangkat Kecamatan/Kelurahan, TKSK, PSM, hingga mahasiswa penerima manfaat) melalui pisau analisis 6 dimensi model Van Meter dan Van Horn (1975). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengungkapan realitas operasional di lapangan, khususnya terkait efektivitas integrasi pendataan digital (Aplikasi Tangerang Live dan DTSEN), kendala disposisi pelaksana, serta tantangan administratif pelaporan SPJ mahasiswa di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang tinggi sebagai acuan evaluasi kebijakan bantuan sosial pendidikan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

Berdasarkan *gap analysis* dan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Mahasiswa di Kota Tangerang berdasarkan enam indikator model Van Meter dan Van Horn (ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana,

komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik), sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta memberikan rekomendasi strategis demi optimalisasi penyaluran bantuan sosial pendidikan di masa mendatang.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Sheila Sabina Putri Defa (2024).	Implementasi Program Kartu Cilegon Sejahtera di Kota Cilegon (Studi Kasus Beasiswa Full Sarjana S1)	Menganalisis implementasi program Beasiswa Full Sarjana dalam Kartu Cilegon Sejahtera.	Kualitatif	Program berjalan cukup optimal, namun terhambat kendala komunikasi antarorganisasi dan masalah teknis aplikasi *Sicerdas*.	Memberikan rujukan kerangka analisis Van Meter & Van Horn dalam mengukur komunikasi antar instansi pelaksana di daerah.
2	Ringgo Saprianto et al. (2023)	Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya	Menilai implementasi dan manfaat program KIP Kuliah bagi mahasiswa kurang mampu.	Kualitatif dengan analisis kuantitatif deskriptif	Program sangat bermanfaat menurunkan beban biaya, namun masih terkendala syarat pengajuan dan kurangnya sosialisasi.	Menjadi pembanding dalam melihat kendala sosialisasi serta pentingnya transparansi informasi bantuan bagi mahasiswa.
3	Yullya Putri Utami (2021)	Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau	Mengkaji pelaksanaan program beasiswa daerah untuk mahasiswa di Kabupaten Lamandau.	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan cukup baik dari sisi komunikasi dan disposisi, namun terhambat pemerataan informasi dan keterbatasan anggaran.	Memberikan acuan metodologis kualitatif serta mempertegas perbedaan penggunaan teori Van Meter & Van Horn.
4	Diah Rahmawati dan Agus Satmoko Adi (2024)	Implementasi Program Beasiswa Genius S1 dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Tingkat Sarjana di Kabupaten Bojonegoro	Menganalisis efektivitas beasiswa Genius S1 dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan tinggi.	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan berjalan baik pada dimensi komunikasi dan sikap pelaksana, namun terkendala sosialisasi dan ketepatan waktu penyaluran.	Relevan untuk membandingkan hambatan ketepatan waktu penyaluran dana dan efektivitas koordinasi dengan dinas terkait.
5	Johannes Kristoffel Santie dan Agus Wahono (2018)	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi di Politeknik Negeri Manado	Menguatkan gambaran pelaksanaan beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa miskin berprestasi.	Kualitatif Deskriptif	Program berjalan sesuai pedoman Dikti, tetapi menghadapi hambatan keterbatasan informasi dan prosedur administratif.	Menjadi acuan perbandingan terkait kendala administratif dan pengumpulan berkas pertanggungjawaban (SPJ) mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Program Bansos Mahasiswa di Kecamatan Larangan. Kerangkan model analisis yang digunakan yaitu model Implementasi kebijakan publik menurut dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi yaitu,

ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang meliputi delapan kelurahan (Larangan Utara, Larangan Selatan, Larangan Indah, Gaga, Kreo, Kreo Selatan, Cipadu, dan Cipadu Jaya). Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 35 informan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni informan utama (*key informant*) yang terdiri dari Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Ketua Tim Bidang Anggaran BPKD, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsa Sosial, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin Dinas Sosial, Operator Data Dinas Sosial, serta TKSK Kecamatan Larangan. Adapun informan pendukung (*secondary informant*) yang mencakup 8 Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan dan 8 Ketua Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta informan sasaran yang terdiri dari 13 mahasiswa penerima manfaat bantuan sosial di wilayah Kecamatan Larangan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan pedoman wawancara terstruktur dan lembar observasi lapangan. Peralatan utama yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan data meliputi Handphone untuk dokumentasi wawancara mendalam, dokumentasi fisik dan observasi lapangan, perangkat lunak VOSviewer untuk pemetaan bibliometrik kebaruan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 35 informan, observasi langsung terhadap proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan melalui kunjungan rumah, serta dokumentasi atas dokumen regulasi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan sistematis, yaitu pengumpulan data, reduksi data dengan pengodean data informan, penyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks operasional, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan pengujian triangulasi serta melakukan *member check* guna memastikan kesesuaian dan akurasi informasi yang diberikan oleh para informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengumpulan data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin diatur secara resmi melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022 dengan alokasi bantuan sebesar Rp6.000.000,00 per mahasiswa. Untuk dapat mengakses bantuan tersebut, pendaftar diwajibkan terdaftar dalam basis DTSEN pada desil 1 sampai 4, memiliki KTP-el Kota Tangerang, berstatus mahasiswa aktif perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi BAN-PT, tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pihak lain, serta memiliki rekening bank yang aktif. Guna memastikan keabsahan berkas fisik dan kesesuaian kondisi sosial ekonomi pendaftar, Tim Dinas Sosial Kota Tangerang bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan jajaran kelurahan melakukan verifikasi lapangan secara langsung dengan mengunjungi rumah calon penerima Bansos Mahasiswa. Berikut dokumentasi pada saat verifikasi lapangan.



Gambar 1. Kegiatan Verifikasi Lapangan di Rumah Pendaftar
Sumber: peneliti, 2026

Gambar di atas merupakan dokumentasi pelaksanaan verifikasi lapangan dengan mengunjungi rumah calon penerima Bansos Mahasiswa oleh petugas Dinas Sosial Kota Tangerang bersama PSM kelurahan untuk mengecek kondisi fisik hunian dan mewawancarai keluarga calon penerima bantuan. Selelanjutnya, mekanisme pendaftaran program telah bertransisi secara penuh menggunakan sistem digital melalui Aplikasi Tangerang Live pada menu Bansos Mahasiswa yang dilengkapi format permohonan dan panduan tutorial. Kendati demikian, pendaftar di lapangan masih menghadapi kendala teknis berupa kegagalan mengunggah berkas akibat batasan ukuran dokumen digital (*max MB*) serta terhapusnya data yang telah diisi saat pendaftar mengoperasikan aplikasi lain untuk melihat Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari aspek pengelolaan data kependudukan, Dinas Sosial Kota Tangerang ditunjang oleh 3 orang operator data tingkat kota dengan 1 orang operator khusus yang menangani pemutakhiran desil warga se-Kota Tangerang, serta 104 orang operator di tingkat kelurahan. Durasi pemutakhiran status desil pada sistem DTSEN membutuhkan waktu berkisar 3 hingga 6 bulan karena harus melewati alur verifikasi berjenjang dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga pengesahan di Kementerian Sosial. Adapun dari aspek pembiayaan, seluruh alokasi dana program ini diampu dan dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Struktur birokrasi dan tata kerja penyaluran bantuan melibatkan keterkaitan fungsi antar instansi, yakni Dinas Sosial Kota Tangerang sebagai pelaksana teknis dan verifikasi, BPKD dalam pengelolaan anggaran daerah, Komisi II DPRD Kota Tangerang pada fungsi pengawasan legislatif, serta jajaran pelaksana wilayah yang meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Seksi Kemasyarakatan (Kasi Kemas), dan 91 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 8 kelurahan.

Tabel 1. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Larangan Tahun 2026

No.	Kelurahan	Jumlah PSM
1.	Larangan Utara	13
2.	Larangan Selatan	15
3.	Larangan Indah	10
4.	Gaga	15
5.	Kreo	13
6.	Kreo Selatan	8
7.	Cipadu	8
8.	Cipadu Jaya	9
JUMLAH		**91**

Sumber: Kecamatan Larangan, 2026

Besaran bantuan mengalami penyesuaian dari Rp8.000.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp6.000.000,00 sejak diterbitkannya Perwal No. 87 Tahun 2022. Penurunan nominal ini didasari oleh temuan audit BPK terkait adanya pengendapan saldo bantuan yang belum terpakai di rekening penerima, serta kebijakan efisiensi anggaran daerah untuk memperluas kuota penerima manfaat. Petugas PSM di 8 kelurahan Kecamatan Larangan tidak menerima pelatihan atau penyuluhan teknis khusus dari Dinas Sosial Kota Tangerang mengenai tata cara penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Arahan yang diterima PSM terbatas pada instruksi penyebaran informasi pendaftaran melalui grup WhatsApp dan pendampingan verifikasi lapangan. Dalam hal pelaporan SPJ, Dinas Sosial Kota Tangerang tidak melibatkan PSM kelurahan dan berkomunikasi secara langsung dengan mahasiswa penerima manfaat melalui grup WhatsApp khusus. Pelaksanaan Program Bansos Mahasiswa terjadi penyesuaian besaran nominal bantuan yang semula bernilai Rp8.000.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp6.000.000,00 sejak diberlakukannya Perwal No. 87 Tahun 2022. Penurunan nilai ini didasari oleh temuan audit BPK terkait adanya pengendapan saldo bantuan yang tidak langsung digunakan di rekening mahasiswa, sekaligus sebagai langkah efisiensi anggaran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan kuota penerima manfaat. Berikut tabel realisasi anggaran Program Bansos Mahasiswa.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Program Bansos Mahasiswa Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Realisasi Penerima	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	2021	237	Rp. 1.896.000.000	8 Juta/Orang
2.	2022	268	Rp. 1.608.000.000	6 Juta/Orang
3.	2023	265	Rp. 1.590.000.000	6 Juta/Orang
4.	2024	395	Rp. 2.370.000.000	6 Juta/Orang
5.	2025	330	Rp. 1.980.000.000	6 Juta/Orang
TOTAL		**1.495**	**Rp 9.444.000.000**	

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun kedua pelaksaan Program Bansos Mahasiswa atau tahun 2022, bantuan yang diberikan ke penerima Bansos Mahasiswa berkurang hingga bantuan yang diberikan menjadi Rp6.000.000. Selain anggaran, para PSM ditingkat wilayah belum dibekali pelatihan atau sosialisasi teknis khusus dari Dinas Sosial Kota Tangerang mengenai tata cara penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga peran mereka terbatas pada penyebaran informasi mengenai pelaporan SPJ. Pelaporan SPJ diurus secara langsung oleh Dinas Sosial Kota Tangerang bersama mahasiswa penerima melalui grup WhatsApp khusus tanpa melibatkan jajaran PSM kelurahan. Penyebaran informasi pendaftaran dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang melalui surat edaran ke 30 perguruan tinggi, grup WhatsApp petugas wilayah, media sosial resmi (Instagram @dinsoskotatng.official, TikTok @tangerangtv), serta portal Tangerang Live. Setelah bantuan dicairkan, Dinas Sosial Kota Tangerang menyelenggarakan sosialisasi pengumpulan SPJ secara terpusat di Gedung Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang dihadiri langsung oleh mahasiswa penerima manfaat. Berikut dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi SPJ pada periode perubahan tahun 2025.



Gambar 2. Sosialisasi SPJ (Surat Pertanggungjawban) oleh Dinas Sosial dan penerima Bansos Mahasiswa
Sumber: Peneliti, 2025

Gambar di atas merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan Program Bansos Mahasiswa. Sosialisasi SPJ tersebut membahas mengenai tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Dinas Sosial Kota Tangerang kepada para mahasiswa penerima bantuan. Mahasiswa penerima bantuan menyerahkan dokumen fisik SPJ berupa kuitansi UKT, nota pembelian laptop, buku, maupun alat tulis secara langsung ke kantor Dinas Sosial Kota Tangerang. Setelah Berikut gambar pada saat proses pengumpulan dan verifikasi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ).



Gambar 3. Proses Pengumpulan dan Verifikasi Berkas SPJ
Sumber: Peneliti, 2025

Dalam proses pengyerahan berkas fisik tersebut, ditemukan adanya hambatan penolakan nota belanja (seperti pembelian pakaian/celana yang dinilai tidak sesuai ketentuan) serta kendala kewajiban pembukaan rekening Bank BJB dalam rentang waktu yang mendesak. Ditinjau dari kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, mayoritas orang tua mahasiswa penerima bantuan di Kecamatan Larangan bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap, seperti buruh jahit konveksi, pedagang keliling, pemulung, dan buruh harian lepas. Pada pendaftaran Periode Murni Tahun 2026, Kecamatan Larangan mencatatkan diri sebagai wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Kota Tangerang, sebagai berikut:

Tabel 3. Penerima Bansos Mahasiswa per Kecamatan Tahun 2026

No.	Kecamatan	Periode Tahun 2026		Jumlah
		Murni	Perubahan	
1.	Cipondoh	17	37	54
2.	**Larangan**	**27**	**21**	**48**
3.	Karawaci	18	27	45
4.	Ciledug	14	26	40
5.	Batuceper	17	20	37
6.	Benda	11	26	37
7.	Karang tengah	14	21	35
8.	Pinang	15	17	32
9.	Neglasari	8	22	30
10.	Cibodas	9	18	27
11.	Tangerang	11	14	25
12.	Periuk	8	11	19
13.	Jatiuwung	3	7	10

Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan data kependudukan DTSEN Tahun 2026, Kecamatan Larangan memiliki 14.038 keluarga pada kategori Desil 1–5 (peringkat ke-7 se-Kota Tangerang) dan 33.661 keluarga pada kategori Desil 6–10. Dukungan politik ditunjukkan oleh Komisi II DPRD Kota Tangerang melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mendorong Dinas Sosial untuk mempermudah persyaratan pendaftaran serta memperluas jangkauan sasaran bantuan

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka Teori Implementasi Kebijakan Publik model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel mendasar, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Pemahaman mengenai ukuran dan tujuan kebijakan Program Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, sebagaimana diatur dalam Perwal No. 87 Tahun 2022, telah diresapi dengan baik oleh seluruh struktur pelaksana, mulai dari Dinas Sosial Kota Tangerang hingga TKSK dan PSM di tingkat kelurahan. Sasaran program ini ditujukan secara eksplisit untuk mahasiswa aktif yang berasal dari keluarga miskin ber-KTP Kota Tangerang dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 hingga 4. Tahapan pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran mandiri secara daring melalui Aplikasi Tangerang Live dengan mengunggah berkas administrasi, dilanjutkan verifikasi dan seleksi dokumen oleh Dinas Sosial, verifikasi faktual melalui kunjungan rumah oleh petugas lapangan bersama PSM, penetapan penerima melalui Surat Keputusan Wali Kota, hingga tahap penyaluran dana transfer langsung ke rekening bank penerima yang diikuti pengumpulan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Kejelasan ukuran dan standar kebijakan tersebut berhasil meminimalkan penyimpangan alokasi bantuan secara administratif. Namun demikian, secara substansial ditemukan hambatan pada proses identifikasi tingkat kesejahteraan di lapangan akibat keterikatan pada indikator DTSEN yang diproduksi secara terpusat oleh Kementerian Sosial. Penggunaan basis data terpusat sering kali memicu fenomena *exclusion error* atau tidak terdatanya masyarakat miskin, serta *inclusion error* di mana masyarakat mampu justru terdata. Di kawasan perkotaan

yang padat seperti Kecamatan Larangan, indikator kemiskinan fisik seperti kepemilikan kendaraan roda dua atau rumah peninggalan keluarga yang sempit sering kali membuat keluarga rentan terlempar ke Desil 6 hingga 10. Hal ini menyebabkan calon penerima gugur secara otomatis dalam sistem seleksi administrasi sebelum sempat diverifikasi secara faktual di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Simbolon, 2025) di Kota Medan yang mengungkapkan bahwa kelemahan mendasar dari akurasi bantuan sosial terletak pada keterikatan pada basis data nasional yang bersifat statis dan lambat diperbarui, sehingga ketidaksesuaian klasifikasi desil nasional terhadap kriteria kemiskinan perkotaan yang dinamis menjadi penghambat utama pemerataan manfaat bantuan sosial pendidikan tinggi.

Dari aspek sumber daya, program ini didukung oleh ketersediaan anggaran APBD Kota Tangerang yang berkelanjutan serta kemudahan sistem pendukung digital melalui aplikasi terpadu Tangerang Live. Kendati demikian, keterbatasan serius dijumpai pada ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola data desil. Kebutuhan pengelolaan data di tingkat kelurahan dilayani oleh 104 operator kelurahan dan 3 operator di tingkat Dinas Sosial, namun pembaruan data desil DTSEN ke tingkat pusat hanya ditangani oleh 1 orang operator khusus untuk mencakup seluruh wilayah Kota Tangerang. Ketidakseimbangan rasio SDM ini menyebabkan penumpukan berkas dan memperlambat alur verifikasi data di daerah, di mana pembaruan desil membutuhkan durasi 3 hingga 6 bulan karena harus melewati alur birokrasi berjenjang dari kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Kementerian Sosial. Rentang waktu yang lambat ini memicu *mismatch* jadwal, di mana durasi pembaruan desil yang lama tidak mampu mengejar jendela waktu pendaftaran bantuan sosial mahasiswa yang terbatas. Hasil ini mengonfirmasi temuan (Widyaningsih, 2023) yang menegaskan bahwa panjangnya alur birokrasi pemutakhiran data kependudukan di tingkat daerah menciptakan kelambatan sistemik yang merugikan kelompok sasaran, di mana regulasi jadwal pendaftaran yang kaku gagal mengakomodasi dinamika perbaikan data di tingkat bawah.

Dilihat dari karakteristik agen pelaksana, struktur pelaksana terdiri dari Dinas Sosial Kota Tangerang selaku pelaksana teknis, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku pengelola anggaran, Komisi II DPRD Kota Tangerang selaku pengawas, serta aparatur wilayah Kecamatan Larangan seperti TKSK, Kasi Kemas, dan 91 orang anggota PSM. Dinamika menonjol pada variabel ini adalah adanya penyesuaian besaran nominal bantuan dari Rp8.000.000,00 menjadi maksimal Rp6.000.000,00 per mahasiswa per tahun anggaran. Pada rentang tahun 2021, dengan nominal Rp8.000.000,00, program ini mencakup 237 mahasiswa dengan total anggaran Rp1.896.000.000,00. Berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi fiskal BPKD, ditemukan adanya saldo bantuan yang mengendap di rekening mahasiswa karena tidak terserap sepenuhnya. Sebagai respon atas temuan tersebut serta kebutuhan untuk memperluas jangkauan penerima di tengah keterbatasan anggaran daerah, nominal bantuan disesuaikan menjadi Rp6.000.000,00 pada periode 2022 hingga 2026. Langkah rasionalisasi ini berhasil meningkatkan jumlah penerima secara bertahap hingga mencapai 395 mahasiswa pada tahun 2024, dengan total akumulasi penyerapan anggaran mencapai Rp9.444.000.000,00 untuk 1.495 mahasiswa. Penurunan besaran bantuan merupakan bentuk kepatuhan dan respon fleksibel agen pelaksana dalam mengoptimalkan *catered population* tanpa menghentikan keberlanjutan program. Temuan ini mendukung hasil penelitian (Prihartini, 2024) mengenai Program Kartu Lansia Jakarta, yang menyimpulkan bahwa penyesuaian nominal bantuan sosial dilakukan oleh agen pelaksana sebagai strategi adaptasi fiskal demi menjaga rasio pemerataan penerima di tengah lonjakan pemohon.

Dalam variabel disposisi atau sikap pelaksana, sikap dan komitmen para pelaksana di tingkat wilayah seperti PSM dan Kasi Kemas di 8 kelurahan Kecamatan Larangan menunjukkan

dedikasi yang tinggi dalam mengawal verifikasi lapangan dan menyebarkan informasi pendaftaran. Namun, ditemukan kelemahan disposisi yang dipicu oleh ketiadaan pembekalan teknis atau sosialisasi khusus mengenai penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Dinas Sosial kepada PSM. Pada tahap awal pendaftaran dan verifikasi lapangan, PSM dilibatkan secara aktif. Namun pada tahap akhir pendampingan SPJ, Dinas Sosial mengambil alih alur bimbingan secara terpusat langsung kepada mahasiswa penerima melalui grup WhatsApp tanpa melibatkan PSM. Ketiadaan sosialisasi teknis ini menyebabkan terputusnya rantai pendampingan di tingkat tapak, sehingga ketika mahasiswa mengalami kendala administrasi akademik seperti keterlambatan penerbitan transkrip nilai atau kebingungan mengenai validitas kuitansi, PSM tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengedukasi maupun mendampingi, yang pada akhirnya memicu keterlambatan penyerahan SPJ. Temuan ini selaras dengan penelitian (Dewi, 2022) yang menegaskan bahwa diskontinuitas pendampingan dari pelaksana tingkat wilayah pada tahap pertanggungjawaban administrasi berpotensi besar menurunkan tingkat kepatuhan kelompok sasaran.

Mengenai komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, saluran komunikasi pendaftaran antara Dinas Sosial, media massa, TKSK, dan masyarakat telah terbangun secara luas. Namun, komunikasi teknis terkait penyusunan SPJ masih menghadapi hambatan. Walaupun Dinas Sosial telah menyediakan panduan berupa *e-book* SPJ dan mengadakan sosialisasi tatap muka bagi mahasiswa penerima, interaksi saat verifikasi fisik berkas SPJ sering diwarnai miskomunikasi akibat kurang detailnya kriteria barang yang dapat dibeli pada awal sosialisasi. Beberapa mahasiswa mengalami revisi berkas akibat ketidakpahaman atas sistem *reimbursement* dan keabsahan nota belanja, selain itu juga mahasiswa mengalami pelayanan yang kurang ramah dari petugas verifikasi yang terkesan kurang humanis. Meskipun demikian, alur komunikasi penanganan keterlambatan telah berjalan responsif, di mana Dinas Sosial memberdayakan PSM untuk melakukan penelusuran langsung ke rumah pendaftar yang kontak digitalnya tidak aktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sari, 2016) yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi dua arah yang konsisten dan berempati dari organisasi pelaksana untuk menghindari ketakutan birokrasi dan kekeliruan pelaporan pada program bantuan hibah sosial.

Ditinjau dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Kecamatan Larangan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi mencapai 11.055 jiwa per kilometer persegi yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Sebagian besar kepala keluarga penerima bekerja di sektor informal seperti buruh jahit konveksi Cipadu, pedagang keliling, dan buruh harian lepas dengan pendapatan tidak tetap serta beban biaya hidup perkotaan yang tinggi. Secara politik, program ini mendapat dukungan penuh dari Walikota Tangerang melalui visi daerah serta Komisi II DPRD Kota Tangerang. Kondisi sosial ekonomi yang rentan menjadikan dana Bantuan Sosial Mahasiswa sebesar Rp6.000.000,00 sebagai instrumen vital jaring pengaman sosial dalam menutupi biaya UKT dan mencegah mahasiswa mengalami putus kuliah, meskipun aturan program membatasi bantuan hanya dapat diterima sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran. Temuan ini memperkuat teori korelasi antara investasi modal manusia dan kemiskinan perkotaan menurut (Alkamah et al., 2021), yang menyatakan bahwa bantuan pembiayaan pendidikan tinggi di wilayah perkotaan berpenghasilan rendah berfungsi secara efektif untuk memotong rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualifikasi tenaga kerja formal.

Penelitian ini menghasilkan kebaruan (*novelty*) baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan penyempurnaan kebijakan daerah. Dari sisi kebaruan teoritis, penelitian ini memformulasikan Model Kesenjangan Dualisme Data dalam kajian implementasi kebijakan bantuan sosial

perkotaan. Penelitian ini membuktikan bahwa kerangka kerja Van Meter dan Van Horn di daerah penyangga perkotaan sangat dipengaruhi oleh kekakuan data desil terpusat. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari kinerja dan komitmen pelaksana di tingkat daerah, melainkan dari sejauh mana fleksibilitas penyesuaian antara data administrasi terpusat (DTSEN) dengan realitas ekonomi masyarakat informal perkotaan yang sangat dinamis. Dari sisi kebaruan praktis, penelitian ini menghasilkan usulan Mekanisme Pendampingan SPJ Berjenjang Terintegrasi yang melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat RW. Rekomendasi ini memutus rantai keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban dengan memberikan pembekalan teknis bagi PSM sebagai pendamping tapak, sehingga mahasiswa penerima bantuan dapat menyelesaikan hambatan birokrasi dan administrasi secara cepat dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Larangan Kota Tangerang menunjukkan bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan telah dipahami secara tepat oleh seluruh agen pelaksana, serta didukung oleh pendanaan APBD yang stabil dan sistem digitalisasi pendaftaran. Namun, efektivitas pencapaian sasaran di lapangan terhambat oleh kekakuan data terpusat (DTSEN) yang memicu fenomena salah sasaran, penumpukan beban kerja pada keterbatasan operator data daerah yang berdampak pada durasi pemutakhiran data yang lambat, serta terputusnya pendampingan teknis oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada tahap penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Respon adaptif agen pelaksana dalam menggeser alokasi nominal bantuan dari Rp8.000.000,00 menjadi Rp6.000.000,00 per mahasiswa terbukti efektif memperluas jangkauan penerima manfaat di tengah keterbatasan anggaran dan tingginya tekanan ekonomi masyarakat perkotaan. Penelitian ini menghasilkan temuan baru berupa Model Kesenjangan Dualisme Data, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di daerah penyangga perkotaan tidak hanya ditentukan oleh komitmen agen pelaksana lokal, melainkan oleh fleksibilitas sinkronisasi antara basis data administrasi terpusat dengan karakteristik kemiskinan perkotaan yang bersifat dinamis. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada fokus cakupan wilayah yang hanya terbatas di Kecamatan Larangan serta keterbatasan akses untuk mengevaluasi data internal proses verifikasi di tingkat Kementerian Sosial secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokus studi secara komparatif di seluruh kecamatan se-Kota Tangerang atau antar wilayah Jabodetabek untuk menguji konsistensi kerangka model Kesenjangan Dualisme Data. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan studi kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur sejauh mana efektivitas dampak bantuan sosial pendidikan tinggi ini terhadap tingkat mobilitas sosial vertikal dan penurunan angka kemiskinan antargenerasi di wilayah perkotaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Program Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Tinggi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan dan penyaluran bantuan finansial, tetapi juga mengkaji keterkaitan antara akurasi pemutakhiran data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam menentukan ketepatan sasaran program. Berbeda dengan kajian implementasi bantuan pendidikan yang cenderung menitikberatkan pada aspek distribusi dan aksesibilitas bantuan, penelitian ini mengidentifikasi persoalan implementasi pada tingkat kecamatan, khususnya keterlambatan pembaruan status desil, keterbatasan pendampingan teknis oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan ketidaksesuaian mekanisme

administrasi dengan kebutuhan penerima manfaat. Dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana faktor sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan kebijakan saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan pendidikan tinggi. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang. Kepada Kecamatan Larangan (Kasi Kemas, PSM, dan Mahasiswa Penerima Bansos Mahasiswa) yang telah memberikan izin, data, serta bantuan selama proses pengumpulan informasi lapangan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, serta seluruh mahasiswa penerima Bansos Mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, A. S. (2024). Implementasi Program Beasiswa Genius S1 Dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Tingkat Sarjana Di Kabupaten Bojonegoro. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 12(2), 203-212. Kajian Moral dan Kewarganegaraan E Journal https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n2.p203%20-%20212

Alkamah, M., Sinring, B., & Baharuddin, D. (2021). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(3), 552-561.

Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. DI Yogyakarta: Samudra Biru.

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Jenjang Perguruan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial

Sabina Putri Defa, S. H. E. I. L. A. (2024). Implementasi Program Kartu Cilegon Sejahtera Di Kota Cilegon (Studi Kasus Beasiswa Full Sarjana S1) (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Santie, J. K., & Wahono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado. MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik), 1(02), 183-192.

Saprianto, R., Raysharie, P. I., Hukom, A., & Takari, D. (2023). Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 251-266. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.239

SARI, A. K. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Surat Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Simbolon, L. L., Aulia, N., Sihombing, O. K. J., Siboro, S. R. J., & Boot, R. (2025). Analisis ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kota Medan: Studi literatur terhadap

implementasi kebijakan. Netizen: Journal Of Society And Bussiness, 2(1), 292-300. Vol. 2 No. 1 (2025): NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS

Utami, Y. P. (2021). Implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 10(1), 1-12.

Widyaningsih, D., & Toyamah, N. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan dan Berkualitas: Pembelajaran dari Studi Kasus di Enam Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 31(2), 179-200. Doi: https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013